

Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana BOS di SDN 021 Kota Bandung Tahun 2023

Muhammad Abdillah Faqih Mardiansyah¹, Mia Rosmiati²

¹Program Studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Bandung, Bandung.

²Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran, Sumedang.

Abstract

This research study explores the implementation of the principles of transparency and accountability in the administration of BOS funds at SDN 021 Bandung City. The research was conducted using a descriptive qualitative method, with the primary data collection process taking place in 2023. The findings of this study indicate that the implementation of accountability in the management of BOS funds is proceeding satisfactorily, with evidence of community involvement. However, the absence of consistent regulatory frameworks resulted in the emergence of several challenges in the management of BOS funds.

Keywords: *Good governance, BOS funds, Accountability, Transparency*

Pendahuluan

Dalam membangun dunia yang lebih modern khususnya dalam pembangunan manusia, pendidikan merupakan unsur yang amat penting (Hung, 2014 ; Mishra et al., 2024). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia secara eksplisit mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pendirian Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Undang-undang dasar 1945 pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan membiayainya khususnya pendidikan dasar. Guna meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2005 pemerintah meluncurkan program Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS). Program ini merupakan program bantuan dana biaya operasi nonpersonalia bagi satuan Pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Program dana BOS juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, sejauh ini dana BOS dianggap berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Baedhowi et al., 2017).

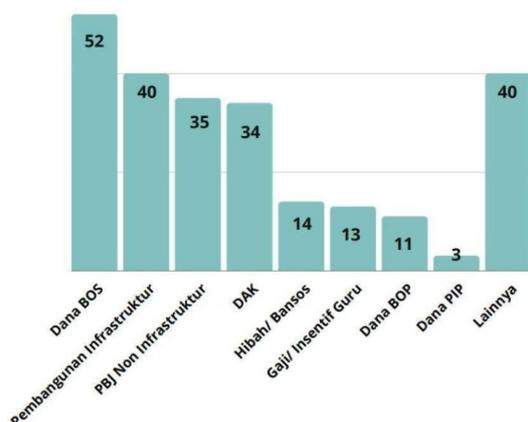
Pelaksanaan program BOS sendiri mengalami beberapa kali perubahan, sebelumnya pada periode 2011 pengelolaan dana BOS dilaksanakan menggunakan konsep desentralisasi dimana pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu pada tahun 2020 melalui program merdeka belajar penyaluran dana BOS tidak dilakukan melalui pemerintah daerah namun dilaksanakan transfer

langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Perubahan mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.07/2020 yang mana merupakan perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Perubahan ini bertujuan agar menambah fleksibilitas dan efektivitas dana BOS. Kurang fleksibel atau kakunya pemanfaatan dana BOS juga dianggap sebagai faktor yang menghambat kreativitas dan inovasi dari para pengajar (Hadna, 2022).

Berdasarkan temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa di tahun 2022 ditemukan 93 kasus korupsi di sekolah dan 51 diantaranya berkaitan dengan dana BOS. Sedangkan temuan *Indonesian Corruption Watch* pada tahun 2021 dari 242 kasus korupsi di sektor pendidikan 52 diantaranya berkaitan dengan dana BOS dan jenis fraud terbanyak dalam korupsi dana BOS yaitu kasus laporan fiktif sebanyak 14 kejadian, adapun kasus-kasus lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran, pungli, penggelapan, pemotongan, proyek fiktif, *mark up*, dan penyalahgunaan wewenang.

Gambar 1.

Korupsi di Sektor Pendidikan berdasarkan Jenisnya.



Sumber : *Indonesian Corruption Watch*

SDN 021 Ciporeat sebagai satuan kerja pemerintah di bawah Dinas Pendidikan Kota Bandung tentunya mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang harus dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan survei awal penulis dan keterangan dari pejabat bidang kurikulum SDN 021 Ciporeat, pada tahun 2021 terjadi keterlambatan pencairan dana BOS pada triwulan ketiga yang disebabkan oleh proses tata kelola yang belum maksimal sehingga menyebabkan operasional sekolah terganggu.

Ditemukan juga bahwa SDN Ciporeat belum secara terbuka memuat laporan keuangan di kanal medianya sehingga informasi penggunaan dana BOS masih sulit diakses oleh publik. Luas bangunan yang terbatas, daya tampung sekolah yang sedikit serta keterbatasan anggaran juga berdampak pada proses belajar mengajar. Luas bangunan yang terbatas, daya tampung sekolah yang sedikit serta keterbatasan anggaran juga berdampak pada proses belajar mengajar.

Kesuksesan alokasi dana bantuan operasional sekolah tentu tergantung juga pada proses tata kelola di setiap satker penerima. Proses tata kelola tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Konsep *good governance* digagas oleh *United Nation Development Programme* (UNDP)

terdiri dari sembilan prinsip dan terdapat empat prinsip utama. Mengutip Sedarmayanti (2004) Empat prinsip utama *good governance* meliputi prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Adapun penerapan prinsip - prinsip tersebut dalam pelayanan publik dapat meningkatkan lingkungan pemerintahan yang efektif, dapat dipercaya, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik (Madjid, 2024) prinsip - prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penyelenggaraan dana BOS yang tertuang dalam Permendikbudristek No 63 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dana BOS 2023. Di Indonesia sendiri penerapan prinsip *good governance* sudah diamanatkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemahaman terkait *good governance* juga terbukti meningkatkan kualitas akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana BOS. *Good governance* mampu meningkatkan kinerja institusi pendidikan melalui pengelolaan yang efektif, akuntabel, dan pelibatan berbagai unsur dalam pengambilan keputusan (Abdelaziz, 2022). Penerapan prinsip *good governance* juga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang (Waluyo et al., 2023) Prinsip akuntabilitas juga dianggap sebagai landasan dalam organisasi publik guna memberikan penjelasan terkait kinerja yang telah dilakukan (Widanti, 2022). Namun prinsip-prinsip *good governance* juga dinilai tidak berpengaruh signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat

(Taufiqi & Ariani, 2022). Terdapatnya gap dalam penelitian - penelitian sebelumnya khususnya terkait akuntabilitas, keterbukaan, serta kepercayaan publik membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan prinsip - prinsip tersebut khususnya dalam tata kelolanya di satuan kerja penerima.

Maka yang menjadi fokus penulis didalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran umum proses pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS di SDN 021 Ciporeat dan mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pengelolaan dana BOS di SDN 021 Ciporeat Kota Bandung tahun 2023.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data berupa wawancara langsung kepada informan kunci dimana yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, operator BOS, Bendahara sekolah, dan Komite sekolah. Selain itu dilaksanakan juga, observasi lapangan, dan dokumentasi serta analisis terhadap dokumen - dokumen yang berkaitan. Adapun analisis data yang dilakukan menggunakan metode interaktif dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan serta verifikasi. Secara pemaparan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimana peneliti mendeskripsikan hasil temuan dalam penelitiannya.

Hasil dan Diskusi

SDN 021 Ciporeat sebagai institusi pendidikan di bawah kementerian pendidikan mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagai sumber dana penunjang operasional. berikut merupakan tahapan pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh SDN 021 Ciporeat :

1. Kepala SDN 021 Ciporeat sebagai kepala satuan pendidikan penanggung jawab pengelolaan dana BOS menyusun tim pengelola yang terdiri dari bendahara sekolah, tenaga administrasi, perwakilan guru, dan komite sekolah
2. SDN Ciporeat mengisi, memutakhirkan, dan memverifikasi data sekolah melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
3. Membuat rekening atas nama satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan melaksanakan rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait.
5. Mengajukan persetujuan RKAS ke dinas pendidikan.
6. Melakukan konfirmasi penerimaan dana melalui aplikasi Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)
7. Melakukan penatausahaan dana BOS yang di koordinir oleh bendahara sekolah.
8. Menggunakan dana BOS sesuai dengan RKAS dan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH).

9. Menyusun laporan realisasi anggaran dan melaporkannya melalui aplikasi ARKAS.
10. Menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada kementerian untuk realisasi semester pertama pada bulan Juli 2023 dan laporan akhir pada bulan Januari 2024 melalui aplikasi ARKAS.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pengamatan terhadap tahapan-tahapan yang dilaksanakan tersebut dapat tergambarkan penerapan prinsip *good governance* di SDN 021 Ciporeat sebagai berikut :

A. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelayanan publik merupakan unsur utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Dalam dunia pendidikan akuntabilitas dinilai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran (Ordofa & Asgedom, 2022). Adapun penerapan prinsip akuntabilitas dalam pendidikan dasar dianggap sebagai kunci dalam meningkatkan kualitas dan inklusivitas (Yan, 2019). Oleh sebab itu menjadi sangat penting sekolah khususnya yang menjadi milik pemerintah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas guna meningkatkan kredibilitasnya.

Pengelolaan dana BOS di SDN 021 Ciporeat tahun anggaran 2023 berdasar pada Permendikbud Nomor 63 tahun 2022. Pengelolaan dana BOS dimulai dari tahap perencanaan yang ditanggungjawab oleh kepala satuan pendidikan yang bertanggung jawab menyediakan data satuan pendidikan yang akuntabel dan melakukan perencanaan sesuai dengan komponen-komponen yang sudah

ditentukan kementerian. Berdasarkan hasil wawancara, dalam proses perencanaan dana BOS SDN 021 Ciporeat sudah mengisi dan melakukan validasi data sekolah melalui sistem dapodik. SDN 021 Ciporeat juga telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai dokumen acuan yang proses penyusunannya disesuaikan dengan rekomendasi raport pendidikan kemendikbud.

Pada proses perencanaan pola penganggaran dilakukan dengan cara setiap bidang menyusun rencana kegiatan namun belum dengan rincian anggarannya, yang selanjutnya diserahkan kepada kepala sekolah dan tim keuangan untuk disusun rincian anggarannya dan ditindaklanjuti untuk dijadikan dokumen RKAS. Dalam menunjang tahap pelaporan SDN 021 Ciporeat menyusun rekening koran, buku kas umum, dan Catatan realisasi anggaran yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi laporan realisasi penggunaan dana BOS. Tahap pelaporan dilaksanakan dua kali. Periode pertama dilaporkan pada bulan Juli 2023 dan laporan akhir dilaporkan pada bulan Januari 2024. Proses penatausahaan dana sudah berbasis digital melalui aplikasi ARKAS dan pengadaan juga dilakukan melalui aplikasi SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). Hanya saja di awal fase transisi penatausahaan berbasis digital terdapat kendala karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan secara terpadu dari pemerintah pusat sehingga terdapat kesulitan dalam proses memahami sistem.

Pada tahun anggaran 2023 terjadi juga perubahan platform

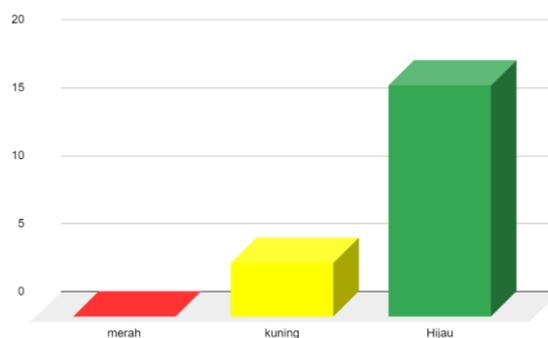
pelaporan dana BOS, sebelumnya aplikasi yang digunakan berasal dari dinas pendidikan Kota Bandung yaitu aplikasi CEKAS, namun berdasar anjuran pemerintah pusat, penatausahaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan dana BOS 2023 harus melalui sistem ARKAS. Pada dasarnya peluncuran aplikasi ARKAS bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pihak sekolah dalam hal pengelolaan BOS. Sebelumnya pelaporan anggaran BOS dilaporkan dua kali secara manual ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat, melalui ARKAS kini sekolah hanya melakukan report satu kali karena ARKAS sudah terintegrasi dengan sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Namun hal ini juga menyebabkan persoalan, berdasarkan hasil wawancara, operator dana BOS di SDN 021 mengalami kendala dalam proses adaptasi pelaporan BOS melalui skema digital. hal tersebut sebetulnya dapat ditangani jika pemerintah pusat sebagai penyelenggara program memberikan sosialisasi dan pendampingan yang baik, Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman (Malahayati & Faizah, 2023). Selain itu sosialisasi dan pelatihan juga menjadi penting karena dapat meningkatkan keterampilan karyawan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan kinerja organisasi (Vasanthi & Rabiyyathul, 2019). Pelatihan juga berpengaruh pada peningkatan produktivitas serta efisiensi organisasi (Dermol, 2012).

Selain itu Dalam tahap pencairan terjadi perubahan, pada tahun sebelumnya pencairan dilakukan 4 bulan sekali atau 3 tahap, sedangkan di tahun 2023 pencairan dilakukan selama 6 bulan sekali atau 2 tahap. Perubahan kebijakan dan sistematika ini memang merupakan niat yang baik dan untuk perbaikan, namun konsistensi dan keberlanjutan juga harus menjadi bahan pertimbangan yang matang. Konsistensi kebijakan juga berpengaruh pada legitimasi suatu badan publik (Engen et al., 2019). Inkonsistensi dan salah urus bisa menyebabkan kegagalan dalam pelayanan publik (Andrews et al., 2006). Maka dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS tidak hanya kompetensi dari pelaksana yang diperlukan tetapi bagaimana para pengambil keputusan dapat merumuskan pula kebijakan - kebijakan yang memiliki semangat keberlanjutan.

Berdasarkan hasil asesi rapor pendidikan tahun 2023 dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS SDN 021 Ciporeat sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas pengajaran, yang pada tahun sebelumnya numerasi mendapat predikat merah kini mendapat predikat kuning. Pada tahun anggaran 2023 SDN 021 Ciporeat tidak mendapat satupun predikat merah, dari 21 indikator yang dinilai SDN 021 Ciporeat mendapat predikat hijau sebanyak 17 dan kuning 4.

Gambar 2.
Capaian Raport Pendidikan SDN 021
Kota Bandung 2023.



Sumber : *Raport Pendidikan 2023*

Berdasar rapor pendidikan 2023 indikator yang perlu ditingkatkan oleh diantaranya berkaitan dengan kemampuan numerasi siswa, pemanfaatan sumber daya sekolah guna peningkatan kualitas, dan pembelajaran untuk peningkatan mutu personil dan non personil.

Pada tahun 2022 kemampuan numerasi siswa SDN 021 mendapatkan predikat merah, namun karena ada upaya kerjasama antara sekolah dan orang tua untuk membiasakan dan melatih kemampuan numerasi peserta didik di tahun 2023 SDN 021 mendapat predikat kuning atau naik satu tingkat. Selain itu pemanfaatan anggaran yang bersumber dari BOS juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengajar dan proses mengajar khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran numerasi.

Hal ini merupakan bukti bahwa kolaborasi dalam implementasi kebijakan serta pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kualitas sekolah. Keberhasilan yang sama juga terjadi di kabupaten Sidenreng, dimana pelibatan masyarakat dalam tata kelola sekolah melalui pendekatan triple helix menjamin akuntabilitas sekolah (Ahmad et al., 2020). Namun bukan hanya kolaborasi saja yang dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan BOS tetapi komitmen juga menjadi faktor yang menentukan (Ramadhani & Hidayati, 2024).

B. Prinsip Transparansi

Keterbukaan informasi akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dan serta berpotensi meningkatkan mutu penganggaran dan pelaksanaan kebijakan/program instansi serta dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Ricky & Rahimallah, 2022). Sebagaimana amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik khususnya yang berkaitan dengan kegiatan, kinerja, laporan keuangan badan publik dan informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.

keterbukaan informasi atau transparansi juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan dana BOS sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendikbud Ristek No 63 tahun 2022 bahwa pengelolaan dana BOS harus dilaksanakan secara transparan. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS tahun anggaran

2023 SDN 021 Ciporeat sudah melakukan pengelolaan dana BOS sesuai dengan prosedur melalui aplikasi ARKAS Kemdikbud. SDN 021 Ciporeat juga secara terbuka mempersilahkan masyarakat untuk mengetahui laporan keuangannya, masyarakat yang ingin mengetahui bisa menghubungi pihak sekolah dan memberitahu alasan dan kepentingan. SDN Ciporeat juga rutin berkomunikasi dengan pihak komite sekolah sebagai representasi masyarakat dalam hal pelaporan kegiatan.

Meski secara umum SDN 021 Ciporeat mempersilahkan masyarakat untuk mengakses laporan penggunaan dana BOS dan kegiatannya, namun SDN 021 Ciporeat belum secara terbuka merilis laporan pelaksanaan dana BOS melalui kanal media khusus, hal ini menyebabkan informasi tersebut belum secara mudah dapat diakses oleh publik. Pemanfaatan teknologi digital yang memudahkan dalam proses penyebaran informasi publik juga belum termanfaatkan secara maksimal.

Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi publik dinilai dapat meningkatkan proses demokrasi dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan publik (Mahmood, 2020). Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik juga berpotensi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Lazor et al., 2024).

C. Prinsip Keterbukaan

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan

sinergitas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang bekerjasama berdasar pada prinsip kesetaraan (Keping, 2018). Penerapan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan melalui skema diskursus dua arah akan menciptakan kebijakan yang lebih tepat guna dan membangkitkan iklim demokrasi deliberatif (Halim, 2014).

Permendikbud Ristek No 63 tahun 2022 mengisyaratkan bahwa pelaksanaan dana BOS dari mulai perencanaan harus senantiasa melibatkan dan menerima saran-saran dari masyarakat. Oleh sebab itu SDN 021 Ciporeat sebagai pelaksana dana BOS dari senantiasa melibatkan masyarakat. Pelibatan komite sekolah dan perwakilan orangtua dalam penyusunan RKAS merupakan bentuk komitmen SDN 021 Ciporeat untuk menjalankan prinsip keterbukaan.

Unsur masyarakat umum yang diwakili oleh komite sekolah dan perwakilan wali murid juga senantiasa dilibatkan dalam kegiatan evaluasi program sekolah yang dilaksanakan secara berkala. Dari hasil wawancara diketahui bahwa SDN 021 Ciporeat secara rutin membangun komunikasi bersama pihak komite sekolah untuk mendiskusikan berbagai kegiatan-kegiatan dan tantangan-tantangan yang terjadi selama proses belajar mengajar.

SDN 021 Ciporeat juga melaksanakan rapat koordinasi bersama orang tua murid setiap awal semester dalam rangka mensosialisasikan dan menerima masukan terkait program sekolah. Di

akhir semester dilakukan juga kegiatan pelaporan hasil pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas belajar murid yang mengundang orang tua murid dan masyarakat. Partisipasi masyarakat khususnya orang tua siswa merupakan upaya untuk mendorong kebijakan sekolah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Fitriah et al., 2013). Namun belum semua aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya fasilitas penunjang dan sumber dana.

Partisipasi Masyarakat dibidang pendidikan merupakan penggunaan hak masyarakat berupa keterlibatan mental dan emosional dalam menentukan keputusan, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pengevaluasian pendidikan sebagai upaya pembangunan pendidikan (Sudiyono, 2016). Di SDN 021 Ciporeat bentuk-bentuk partisipasi publik yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pelibatan komite sekolah dan perwakilan wali murid dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
2. Pelibatan unsur masyarakat umum, komite sekolah, dan perwakilan wali murid dalam evaluasi program/ kegiatan secara berkala
3. Pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi bersama wali murid terkait kegiatan belajar mengajar di awal semester
4. Kegiatan akhir pelaporan pelaksanaan kegiatan sekolah dan evaluasi pembelajaran murid di akhir semester.

Kolaborasi antar berbagai pihak dapat mengembangkan solusi inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan (Tobin, 2021). Upaya kolaboratif dalam administrasi publik juga merupakan proses mengkonkretkan penyediaan layanan terpadu (Wouters et al., 2023).

D. Prinsip *Rule of Law*

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pelayanan publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah diberlakukannya aturan hukum secara adil dan merata (Nubatonis et al., 2014). Dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat tentu dalam pengelolaannya termasuk kedalam tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam pelaksanaan dana BOS SDN 021 Ciporeat tahun anggaran 2023 berdasar kepada Permendikbud Ristek Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Dalam aspek tata kelola keuangannya SDN 021 Ciporeat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Sebagaimana petunjuk teknis

pengelolaan dana BOS 2023 pengelolaan dana BOS harus memperhatikan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Penerapan prinsip fleksibel diterapkan oleh SDN 021 Ciporeat dalam proses perancangan RKAS dimana program sekolah disusun berdasar pada masukan-masukan pihak terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. SDN 021 Ciporeat juga mencapai tingkat realisasi anggaran seratus persen dan tidak mendapat satupun predikat kurang dalam hasil penilaian rapor pendidikan 2023.

Dalam proses pelaporan SDN 021 Ciporeat juga mengumpulkan laporan penggunaan dana BOS dengan tepat waktu. Laporan semester pertama dikumpulkan pada bulan Juli 2023 dan laporan akhir dikumpulkan pada bulan desember 2023 sesuai linimasa kementerian. SDN 021 Ciporeat juga menerima anggaran dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang terverifikasi di dapodik.

Sebagaimana diamanatkan juga dalam Permendikbud Ristek Nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, bahwa pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara fleksibel, efektif, akuntabel, dan transparan. Oleh sebab itu SDN 021 Ciporeat menerapkan prinsip tersebut dengan gambaran sebagai berikut :

1. Fleksibel

Fleksibilitas pengelolaan dana BOS di SDN Ciporeat ditunjukkan dengan proses perencanaan RKAS yang disusun berdasarkan saran-saran serta masukan pihak

terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

2. Efektif

Pada periode 2023 mencapai tingkat realisasi anggaran seratus persen dan tidak mendapat satupun predikat kurang dari hasil penilaian rapor pendidikan.

3. Akuntabel

Mekanisme penggunaan dana BOS di SDN Ciporeat dilakukan dengan baik, hal ini dapat dinilai dari tidak adanya keterlambatan dalam proses pelaporan di tahun anggaran 2023 dan anggaran yang diterima sesuai dengan jumlah siswa yang terverifikasi di Dapodik.

4. Transparan

SDN 021 Ciporeat melaporkan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui langsung laporan pertanggungjawabannya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SDN Ciporeat menunjukkan komitmennya terhadap penerapan prinsip rule of law. Berdasarkan wawancara dan observasi pun SDN 021 selama tahun anggaran 2023 tidak pernah mendapatkan sanksi baik secara administratif, perdata, pidana atau sanksi lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai penerapan prinsip prinsip good governance dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di

SDN 021 Ciporeat Kota Bandung tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa :

1. SDN 021 Ciporeat sudah menerapkan prinsip akuntabilitas secara baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah terlaksananya tata kelola dana BOS sesuai dengan standar yang berlaku, realisasi anggaran tercapai seluruhnya, dan tidak mendapat satupun catatan merah dalam penilaian rapor pendidikan. SDN 021 Ciporeat juga mengikuti petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dengan baik dari mulai tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Penerapan prinsip akuntabilitas sangat membantu memotivasi terlaksananya pengelolaan dana BOS dengan baik.
2. Dalam penerapan prinsip transparansi SDN 021 Ciporeat secara terbuka mempersilahkan masyarakat untuk mengetahui dan menanyakan terkait tata kelola dana BOS, SDN 021 Ciporeat juga secara terbuka menyampaikan laporan pertanggungjawabannya melalui aplikasi ARKAS Kemdikbud. Namun SDN 021 Ciporeat belum secara mandiri mempublikasi laporan pelaksanaan dana BOS melalui kanal media sekolah sehingga publik belum secara praktis dapat mengetahui informasi terkait pengelolaan dana BOS.
3. SDN 021 Ciporeat sudah menerapkan prinsip keterbukaan dengan baik.

- Komite sekolah, perwakilan orang tua siswa, dan masyarakat senantiasa dilibatkan dan berperan aktif dalam pengelolaan dana BOS meskipun ada beberapa aspirasi yang belum terealisasi karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Penerapan prinsip keterbukaan membantu menciptakan program yang lebih tepat guna.
- SDN 021 Ciporeat senantiasa mengacu kepada aturan hukum dalam pelaksanaan dana BOS. Selama pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2023 tidak sekalipun SDN 021 Ciporeat menerima sanksi baik secara administratif, perdata, maupun pidana. hal ini menunjukkan bahwa prinsip kepatuhan hukum sangat dijunjung tinggi oleh SDN 021 Ciporeat.

Adapun saran yang diajukan kepada SDN 021 Ciporeat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS dan kualitas belajar mengajar sebagai berikut :

- SDN 021 Ciporeat harus memiliki kanal media digital yang lebih aktif serta informatif guna mempermudah masyarakat dalam melihat kinerja dan memberikan saran khususnya terkait pengelolaan dana BOS.
- SDN 021 Ciporeat harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola dana BOS guna memaksimalkan proses belajar mengajar dan merealisasikan aspirasi masyarakat.
- Pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi khususnya terkait sosialisasi dan monitoring pengelolaan dana BOS di setiap satuan pendidikan.
- Perlu ada peninjauan kembali oleh pemerintah pusat terkait besaran biaya bantuan pendidikan kepada setiap satuan pendidikan guna memaksimalkan kualitas belajar mengajar di setiap satuan pendidikan.

Referensi

- Abdelaziz, S. (2022). The Relation between Good Governance and Improving Performance in the Higher Education -HE- Institutions. *Business and Management Studies*. doi:10.11114/bms.v8i2.5789
- Ahmad, J., Adnan, A. A., Hanafi, M., & Qomaruddin, Y. (2020). Triple helix and decentralization approach: Management of school operational assistance funds. *Universal Journal of Educational Research*. 10.13189/ujer.2020.081054
- Andrews, R., Boyne, G. A., & Enticott, G. (2006). Performance failure in the public sector: Misfortune or mismanagement? *Public Management Review*. 10.1080/14719030600587612
- Baedhowi, Martono, T., Totalia, S. A., Laksono, P. W., Triyanto, & Octaria, D. (2017). Effectiveness of school operational support funds to quality of students learning

- process and outcomes in vocational high school. *Advanced Science Letters*.
- Dermol, V. (2012). Synergetic effects of training and training transfer factors in organisations. *International Journal of Management in Education*.
- Engen, N. V., Steijn, B., & Tummers, L. (2019). Do consistent government policies lead to greater meaningfulness and legitimacy on the front line? *Public Administration*.
- Fitriah, A., Suminto, B., Subekti, N. B., & Hassan, Z. (2013). A different result of community participation in education: An Indonesian case study of parental participation in public primary schools. *Asia Pacific Education Review*. 10.1007/s12564-013-9275-8
- Hadna, A. H. (2022). AN EVALUATION OF THE SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) POLICY AND ITS EFFECT ON TEACHER PERFORMANCE IN INDONESIA. *Malaysian Online Journal of Educational Management*.
- Hadna, A. H. (2022). An Evaluation of The School Operational Assistance (BOS) Policy and Its Effect on Teacher Performance in Indonesia. *Malaysian Online Journal of Educational Management*.
- Halim, A. (2014). *MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah / Abdul Halim* (1st ed.). Salemba Empat.
- Hung, H. T. M. (2014). The making of citizens in Islamizing Malaysia. In E. Vickers (Ed.), *Constructing Modern Asian Citizenship*. Taylor & Francis. 10.4324/9780203734087-18
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan : Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi*.
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*.
- Lazor, O., Lazor, O., Zubar, I., Zabolotnyi, A., & Yunky, I. (2024). The Impact of Digital Technologies on Ensuring Transparency and Minimising Corruption Risks among Public Authorities. *Pakistan Journal of Criminology*. 10.62271/pjc.16.2.357.374
- Madjid, u. (2024). Quality of Public Services: The Role of State Civil Apparatus in Realizing Good Governance. *Journal of Ecohumanism*.
- Mahmood, Z. (Ed.). (2020). *Web 2.0 and Cloud Technologies for Implementing Connected Government*. IGI Global. 10.4018/978-1-7998-4570-6.ch001
- Mishra, M., Parameswari S, Ramachandra, Ashok, Kumar, & Kannadhasan. (2024). Teacher Education for Quality Enhancement in the Age of Globalisation in Developing Countries. In *Proceedings of Ninth International Congress on Information and Communication Technology: ICICT 2024, London, Volume 8*. Springer Nature Singapore. 10.1007/978-981-97-3305-7_25

- Nubatonis, S. E., Rusmiwari, S., & Suwasono, S. (2014). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Ordofa, B., & Asgedom, A. (2022). School accountability and its relationship with learning outcomes: A systematic literature review. *School accountability and its relationship with learning outcomes: A systematic literature review*. 10.1016/j.ssaho.2022.100358
- Pamungkas, A. Y. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sma Negeri Di Kota Samarinda. *Universitas Islam Indonesia*.
- Ramadhani, A. K., & Hudayati, A. (2024). The Effect of Organizational Commitment on the Effectiveness of School Operational Assistance Funds in Elementary Schools in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*.
- Ricky, & Rahimallah, M.T. A. (2022). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA (PERSPEKTIF AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
- Sedarmayanti. (2004). *Good governance (kepemrintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (kepemrintahan yang baik)*. Mandar Maju.
- Sudiyono, L. (2016). *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan*.
- Taufiqi, D., & Ariani, K. R. (2022). Pengaruh Pemerintahan yang Baik, Akuntabilitas, dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Procedia of Social Science and Humanities*. <https://doi.org/10.21070/pss h.v3i.158>
- Tobin, T. (2021). Enhancing police services in the United States through public and interagency collaboration. In *Enhancing Police Service Delivery: Global Perspectives and Contemporary Policy Implications* (pp. 109 - 124). Springer International Publishing. 10.1007/978-3-030-61452-2_8
- Vasanthi, & Rabiyyathul, B. S. (2019). Pros and cons of on the job training versus off the job training. *International Journal of Scientific and Technology Research*.
- Waluyo, T., Harsono, & Suyatmini. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah*. 10.31538/munaddhomah.v4i1 .316
- Widanti, N. P. T. (2022). Public Service Accountability Approach In Following Changes In The New Paradigm Of Public Administration. *Res Militaris*.

- Wouters, S., Janssen, M., Lember, V., & Crompvoets, J. (2023). Strategies to advance the dream of integrated digital public service delivery in inter-organizational collaboration networks. *Government Information Quarterly*. 10.1016/j.giq.2022.101779
- Yan, Y. (2019). Making accountability work in basic education: reforms, challenges and the role of the government. *Policy Design and Practice*. 10.1080/25741292.2019.1580131
- Zurina, & Hukil. (2012). Appraising good governance in malaysia based on sustainable development values. *Journal of Sustainability Science and Management*.